

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik yang terjadi di Indonesia mengakibatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka mengelola keuangan dan kekayaan daerah menjadi aspek yang tidak kalah penting untuk diperhatikan pada suatu pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai wewenang untuk menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala daerah dan pejabat yang telah ditetapkan mempunyai tanggung jawab untuk dapat mengelola laporan keuangan daerah yang menyajikan segala informasi tentang kegiatan penggunaan dana daerah secara akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat selaku penyelenggara aktivitas pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2009):

“Secara umum akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Berdasarkan definisi diatas, maka akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai salah satu media pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola dana yang terdapat pada daerah. Akuntabilitas oleh

pemerintah daerah dapat ditinjau menurut bagaimana pemerintah daerah menyajikan setiap informasi pada laporan keuangan yang diterbitkan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), laporan keuangan perlu diaudit terlebih dahulu oleh BPK sebelum diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD. Setelah laporan keuangan diaudit, BPK akan memberikan opini yang sesuai. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat empat jenis opini yang diberikan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan, yaitu Opini WTP, Opini WDP, Opini Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat. Menurut Darmawan (2018), opini WTP terkait tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa laporan keuangan yang tersaji telah memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang baik dan benar.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatannya. Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyajian laporan keuangan daerah. Nordiawan dan Hertianti (2010) mendefinisikan penyajian laporan keuangan daerah sebagai faktor penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menyajikan laporan keuangan daerah secara utuh dan optimal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk mengelola dana daerah. Penyajian laporan keuangan daerah yang baik menyajikan laporan keuangan secara relevan, andal, dapat

dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai dengan syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah aksesibilitas laporan keuangan daerah. Menurut Mulyana (2006) aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Masyarakat sebagai pihak yang memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah memiliki hak agar dapat mengakses setiap informasi yang tersaji pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah. Kemudahan masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas.

Selain penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah, faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sistem pengendalian internal. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, sistem pengendalian internal adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan benar pada suatu pemerintah daerah mampu membantu terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam rangka menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor terakhir yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia disebut juga sebagai tenaga kerja. Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Setiap sumber daya manusia perlu untuk memiliki kompetensi kerja yang baik sehingga mampu menghasilkan pekerjaan yang optimal. Begitu juga dengan sumber daya manusia yang bekerja di suatu pemerintahan. Adanya kompetensi sumber daya manusia mampu meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun, disetiap penelitian memberikan hasil dan kesimpulan yang berbeda-beda. Penelitian Fauziyah (2017) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Masyhur (2017) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Saragih (2015) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian selanjutnya memberikan hasil dan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian terdahulu diatas. Penelitian Indria (2018) menunjukkan bahwa

penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Mulyani (2018) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan *value for money* berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Safridha (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil uji dan kesimpulan dari penelitian terdahulu yang tidak konsisten dan berbeda memotivasi peneliti untuk melakukan pengujian kembali terhadap variabel yang digunakan di penelitian terdahulu dengan menggunakan subjek penelitian yang berbeda, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Alasan peneliti memilih Kabupaten Gunungkidul sebagai subjek penelitian karena pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah memperoleh Opini WTP. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperoleh Opini WTP sebanyak empat kali berturut-turut dan bertekad untuk mempertahankannya dalam tahun yang akan datang. Akan tetapi, Kepala BKAD Gunungkidul, Saptoyo, menyatakan meskipun telah meraih predikat WTP, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu menindaklanjuti hasil audit yang disampaikan oleh BPK. Hal ini dikarenakan masih diperlukannya perbaikan terkait aset, sistem pengendalian

internal yang berhubungan dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan dan pendapatan, dan tingkat kepatuhan serta regulasi. “Kami coba hubungkan sistem yang ada dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terus disempurnakan”, kata Saptoyo (yogyakarta.bpk.go.id). Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Gunungkidul Provinsi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gunungkidul?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gunungkidul?
3. Apakah sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gunungkidul?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gunungkidul?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan motivasi diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji kembali variabel dari penelitian terdahulu, yaitu penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan objek penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan, pelengkap dan menjadi referensi terbaru untuk penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk mengevaluasi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.